

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA OLEH DINAS
SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA TANJUNGPINANG**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

**NAZILA SYAMSIANI
NIM : 110565201213**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA OLEH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA TANJUNGPINANG

NAZILA SYAMSIANI

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Pemerintah Kota Tanjungpinang, memberi pelatihan keterampilan kepada pemuda pengangguran yang memiliki potensi mengembangkan diri sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Mereka akan dilatih berbagai keterampilan agar bisa bersaing dalam dunia kerja dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Mereka diberi pelatihan keterampilan perbengkelan sepeda motor, elektronika, dan mesin diesel untuk kapal kayu kecil. Masalah yang dihadapi pemerintah kota adalah terbatasnya lapangan kerja, sehingga selalu menambah angka pengangguran, terutama mereka yang tingkat keterampilannya rendah. Banyaknya tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran, sehingga kesempatan kerja di sektor formal sangat kecil, sementara mereka tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.

Tujuan dalam penelitian ini untuk Mengevaluasi Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Operasionalisasi konsep yang di gunakan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep Dunn (2003:610). Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 6 orang. Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa masih ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam melaksanakan program tenaga kerja oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam program pelatihan keterampilan kepada pemuda pengangguran tahun 2014. Pelatihan yang diadakan tidak langsung membawa dampak bagi pengurangan angka kemiskinan. Hal ini dilihat dari setiap tahun angka pengangguran di Kota Tanjungpinang masih terus meningkat. Kemudian dalam program ini juga belum dilakukan secara merata keseluruh pemuda karena keterbatasan dana, fasilitas serta informasi. Tidak semua masyarakat mampu berpartisipasi dalam mengurangi masalah pengangguran

Kata Kunci : Evaluasi, Pemberdayaan, Tenaga Kerja

A B S T R A C T

Tanjungpinang City Government, giving skills training to unemployed youth who have the potential to develop themselves so that it is able to compete in the workforce. They will be trained in various skills in order to compete in the world of work and can create jobs on its own. They were given skills training workshop, electronics, motorcycles and diesel engines for small wooden boats. The issues facing the City Government is the limitation of employment, so that always add to the unemployment figures, especially those with low skills levels. The large number of labour in the formal sector has also become one of the factors the causes of the high unemployment figures, so that the employment opportunities in the formal sector is very small, while they can't create jobs on its own.

The goal in this research to evaluate the Program of Empowering the workforce By a social and Labour Service of the city of Tanjung Pinang Operasionalisasi concept used in this study refers to the concept of Dunn (2003:610). Informants in this study i.e. as 6 people. The analysis of the data used in this study is the analysis of qualitative data.

Based on the research results can then be analyzed that there are still a few things that should be noticed in carrying out the program of labor by Social Service and workforce training program in Tanjungpinang City skills to the youth unemployment by 2014. Training held indirect impact for poverty reduction. It is seen from the unemployment figures every year in the town of Tanjung Pinang is still on the rise. Later in the program also have not carried out evenly across the youth because of limited funds, facilities and information. Not all communities were able to participate in alleviating the unemployment problem

Keywords: Evaluation, Empowerment, Labor

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Kegiatan pengembangan SDM akan memberikan sumbangan yang besar pada peningkatan kualitas SDM yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan individu sebagai pelaku ekonomi. Berdasarkan program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja DEPNAKERTRANS (2006:1) , berkaitan dengan SDM Indonesia, pembangunan ketenagakerjaan di arahkan pada peningkatan kualitas manusia dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan ketenagakerjaan di tujuakan untuk memperluas lapangan kerja produktif dari segi jumlah maupun mutunya.

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan di masing-masing sektor. Sementara kondisi struktur ketenagakerjaan terjadi pergeseran yang cukup menonjol, yaitu dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri utamanya di daerah perkotaan. Untuk itu melalui program tenaga kerja mandiri mempunyai arti penting dan strategis dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi masalah pengangguran.

Melalui pembangunan ketenagakerjaan di harapkan terjadi penyerapan tambahan angkatan kerja baru, penurunan jumlah pengangguran, transformasi pekerja antar sektor, peningkatan kesempatan kerja

khususnya disektor industri dan jasa. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui jalur diantaranya pendidikan dan pelatihan serta pengembangan keterampilan di tempat kerja. Pelatihan merupakan jalur peningkatan kualitas SDM yang lebih menekankan ke pembentukan dan pengembangan profesionalisme atau kompetensi.

Kesempatan kerja di sektor informal cukup banyak berkembang dewasa ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menjadi pendorong sekaligus peluang yang cukup besar dalam pengembangan dan peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun globalisasi dan iklim persaingan yang semakin ketat juga menuntut sektor informal untuk semakin kreatif dan produktif tidak hanya untuk berkembang tapi juga untuk dapat bertahan.

Pada bidang tenaga kerja di prioritaskan untuk perluasan kesempatan kerja melalui penyebaran informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan berusaha, pemagangan dan pelatihan, kelembagaan, pengawasan dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang menjadi fasilitator untuk menyelenggarakan pelatihan kerja yang mengembangkan program-program pelatihan kerja sebagai pemuda-pemuda yang putus sekolah atau bagi mereka yang sedang mencari kerja atau menganggur yang direkomendasikan oleh 18 kelurahan yang ada di Tanjungpinang setiap tahunnya untuk membekali mereka dengan keahlian

khusus dan keterampilan agar dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kualitas tenaga kerja yang tinggi serta dalam penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) industri maupun keunggulan kooperatif dalam memasuki dunia kerja. Pentinglah pertumbuhan industri yang tinggi perlu guna mengisi kesempatan yang ada di masing-masing perusahaan. kendala yang terjadi adalah tidak selalu lowongan pekerjaan dapat dimasuki oleh tenaga kerja.

Adapun yang melatar belakangi di lakukan penelitian ini dikarenakan adanya permasalahan ketenagakerjaan saat ini, masih dihadapkan dengan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di setiap daerah, oleh karena itu baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga pelatihan dapat bersama-sama mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu masalah lainnya adalah terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kualitas kerja, baik dari ketrampilan maupun pendidikan yang belum dikuasai oleh tenaga kerja, baik di dalam Negeri maupun di Luar Negeri.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sebagai Instansi yang berkaitan dan bertanggungjawab dalam ketenagakerjaan, dapat mendorong penciptaan lapangan kerja serta menjadi fasilitator ketenagakerjaan yang kondusif aman dan dapat mensejahterakan masyarakat. Disosnaker Kota Tanjungpinang, melaporkan bahwa, kegiatan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan

kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, selain itu juga, para peserta dapat menambah ilmu dan wawasan serta dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. (<http://www.kepritoday.com/>)

Pemerintah Kota Tanjungpinang, memberi pelatihan keterampilan kepada pemuda pengangguran yang memiliki potensi mengembangkan diri sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja. Mereka akan dilatih berbagai keterampilan agar bisa bersaing dalam dunia kerja dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Mereka diberi pelatihan keterampilan perbengkelan sepeda motor, elektronika, dan mesin diesel untuk kapal kayu kecil. Setiap kelurahan hanya diambil satu orang untuk mengikuti pelatihan ini. Mereka mengikuti pelatihan selama 20 hari untuk memperoleh sertifikat keahlian yang ditandatangani pihak SMK III Tanjungpinang serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Setelah mengikuti pelatihan dan memiliki keterampilan atau keahlian, diharapkan mereka bisa menciptakan lapangan kerja dan bersaing dalam mencari pekerjaan. Diharapkan dengan program ini bisa membantu mengurangi angka pengangguran di Kota Tanjungpinang. Masalah yang dihadapi pemerintah kota adalah terbatasnya lapangan kerja, sehingga selalu menambah angka pengangguran, terutama mereka yang tingkat keterampilannya rendah. Banyaknya tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran, sehingga kesempatan kerja di sektor formal sangat kecil, sementara mereka

tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul :
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA OLEH DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KOTA TANJUNGPINANG.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada serta gejala-gejala masalah yang telah diuraikan tersebut, maka perumusan masalahnya adalah: "Mengevaluasi apakah Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2014?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan di lakukannya penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan Program pelatihan kerja di tahun hadapan.
- b. Secara Akademis, penelitian ini berguna untuk mengembangkan pengetahuan umum, ilmu

pemerintahan khususnya dan lebih luas pada bidang pelaksanaan program.

D. Konsep Operasional

Untuk menyamakan persepsi antara peneliti dan pembaca maka dalam penelitian ini disusun konsep operasional Menurut Wiliam Dunn (2003 : 610)

1. Efektifitas, Berkenaan dengan apakah program pelatihan dan keterampilan kepada pemuda pengangguran tersebut mencapai hasil yang diinginkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator :
 - a. Berkurangnya angka pengangguran di Kota Tanjungpinang
 - b. Adanya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran
2. Efisiensi : Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan agar program pelatihan dan keterampilan kepada pemuda pengangguran ini dapat berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari indikator :
 - a. adanya peran pemerintah seperti menyediakan sarana dan prasarana yang layak untuk program pelatihan dan keterampilan kepada pemuda pengangguran.
 - b. Adanya sosialisasi yang dilakukan pihak dinas

- tenaga kerja agar masyarakat dapat mengetahui manfaat dari pelatihan dan keterampilan kepada pemuda pengangguran
3. Kecukupan : Berkenaan dengan seberapa jauh program ini telah dijalankan. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Peserta yang mengikuti pelatihan dapat membuka usaha dan lebih mandiri
 4. Perataan : Program pelatihan dan keterampilan kepada pemuda pengangguran tersebut dilaksanakan merata serta terpenuhinya seluruh kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari indikator : Program ini dilakukan secara merata keseluruh pemuda pengangguran
 5. Responsivitas: berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Kepuasan masyarakat terhadap program pelatihan dan keterampilan kepada pemuda pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari indikator : Adanya masyarakat yang turut memajukan para pemuda yang pengangguran atau belum bekerja dengan membentuk unit kelompok usaha bersama.
 6. Ketepatan : suatu hasil pelaksanaan yang dilihat dari kesesuaian biaya dengan standar dan bentuk Surat Pertanggung

Jawaban yang sesuai dengan ketentuan juklak dan juknis. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

- a. Adanya kesesuaian biaya yang telah dianggarkan oleh pemerintah untuk program pelatihan dan keterampilan kepada pemuda pengangguran
- b. Adanya perhatian seperti bantuan yang diberikan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Tanjungpinang

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan data kualitatif, Menurut Sugiyono (2009 : 11) penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya”. Kembali Sugiyono (2009 : 14) “ Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar ”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dalam mengatasi pengangguran merupakan sebuah konsep abstrak atau fenomena sosial yang sangat perlu diteliti menggunakan penelitian deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud mengumpulkan data tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Oleh

Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang Dalam Program Pelatihan Keterampilan Kepada Pemuda Pengangguran Tahun 2014 yang kemudian dimana hasilnya disekripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan dilapangan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, Teknik analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dalam bentuk mudah dibaca dan diinterpretasikan, yakni seluruh data yang didapat dan dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dianalisa secara kualitatif. Bila data yang sudah terkumpul maka penulis pilah menurut jenisnya, selanjutnya menganalisis data-data yang terkumpul dengan cara deskriptif yaitu memaparkan data apa adanya sesuai dengan fakta yang diperoleh menjadi data yang sistematis, terstruktur dan mempunyai makna. Dalam penelitian ini maka untuk menyempurnakan hasil penelitian di tuliskan kata, dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya agar mudah dimengerti oleh pembaca.

Moleong (2006:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. Adapun langkah – langkah analisa data yang dilakukan adalah : (1) menelaah dari semua data

yang tersedia dari berbagai sumber, (2) reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi, (3) menyusun data kedalam satuan-satuan, (4) pengkategorian data sambil membuat koding, (5) mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dan (6) penafsiran data secara deskriptif

II. LANDASAN TEORI

A. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dapat juga diartikan sebagai *review*, seperti yang diungkapkan oleh Al-Amin (2006:97), yaitu : “Melihat kembali apa yang sedang atau telah dikerjakan, atau dalam arti menyeluruh maka evaluasi berarti suatu kegiatan mencakup penilaian terhadap laporan atau hasil dari suatu program yang telah dilaksanakan, penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap kebijaksanaan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penilaian terhadap kinerja manajemen secara keseluruhan”.

Menurut John Salindeho, seperti yang dikutip Al-Amin (2006:98) menjelaskan bahwa : “Evaluasi merupakan suatu sistem yang mengamati, meninjau kembali perbuatan atau pelaksanaannya sendiri dan membandingkannya dengan pelaksanaan yang dikehendaki atau yang sesungguhnya”. Sebagai proses umpan balik pada saat kegiatan dilaksanakan, evaluasi juga berarti tidak saja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan semata, namun juga pada saat proses kegiatan sedang berlangsung agar kegiatan dapat berjalan lancar dan

mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran sedini mungkin dan sekecil mungkin. Evaluasi seperti ini dimaksudkan sebagai umpan balik dalam suatu proses kegiatan.

Suatu program yang telah dijalankan perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk itu suatu program mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu evaluasi dan sangat berguna serta merupakan fungsi manajemen yang menentukan tercapainya tujuan didalam organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Evaluasi ini dapat diketahui keberhasilan dan kekurangannya pada suatu program dalam rangka penyempurnaan kebijakan yang terlebih dahulu, mempertimbangkan nilai-nilai positif, serta teknik yang digunakan untuk melakukan penilaian demi tercapainya tujuan di dalam organisasi tersebut.

Dengan pandangan yang tidak jauh berbeda, kebijakan diterjemahkan kedalam program dan proyek dengan tindakan fisik, sehingga suatu kebijakan menimbulkan konsekuensi (hasil efek atau akibat) dan membagi konsekuensi kebijakan menjadi dua jenis, yaitu ; *output* dan *outcome*. Menurut Arikunto, setiap kegiatan evaluasi biasanya dimaksudkan untuk mengembangkan kerangka berpikir dalam rangka pengambilan keputusan (2010:292). Suatu evaluasi dalam proses pengembangan dimaksudkan sebagai perbaikan sistem dengan tujuan, sebagai berikut :

- a. Pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat.
- b. Penentuan tindak lanjut hasil pengembangan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, evaluasi perlu dilaksanakan terhadap suatu program atau kegiatan, dalam hal ini bukan untuk memberikan keseimbangan nilai benar atau salah, namun untuk melihat sejauh mana suatu program atau kegiatan tersebut diadakan penyempurnaan serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dan pada intinya tujuan utama evaluasi tersebut adalah tidak mencari kesalahan-kesalahan, tetapi bagaimana untuk memperbaiki hasil temuan-temuan yang diperoleh / didapatkan dalam evaluasi tersebut pada suatu program atau kegiatan lainnya.

Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan . Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Sesungguhnya evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2003:184), yaitu : evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Oleh karena komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak.

Evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi dan kebijakan publik.

Menurut Edward A. Suchman, seperti yang dikutip Nugroho (2003:199) ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program
2. Analisa terhadap masalah
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Untuk dapat melihat keberhasilan suatu program yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh dunia swasta, evaluasi sangat memegang peranan yang sangat penting. Suatu evaluasi sangat berguna dan merupakan fungsi manajemen yang sangat menentukan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna. Evaluasi juga dipakai untuk melihat dan mengetahui keberhasilan serta kekurangan suatu program dalam rangka penyempurnaan baik dalam tahap rencana maupun dalam tahap pelaksanaan berikutnya.

Banyak sekali pendapat yang menentang makna dan arti evaluasi, namun yang dimaksud dalam rencana penelitian ini bukan untuk mempertentangkan apa itu evaluasi, akan tetapi lebih jauh evaluasi

dipergunakan untuk menganalisa sebuah keputusan pemerintah yang di tujukan kepada publik ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan yang diharapkan. Dalam evaluasi suatu kebijakan manfaat-manfaat yang diperoleh, menurut Al-Amin (2006:99) adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid mengenai kinerja manajemen, kebijaksanaan, program, kegiatan. Dengan evaluasi ini dapat diungkapkan mengenai pencapaian suatu tujuan, sasaran dan target tertentu.
2. Evaluasi memberikan gambaran dasar bagi titik *take of* (menuju) untuk rencana selanjutnya, atau memberikan gambaran keadaan potensi maupun hambatan mengenai keadaan sewaktu akan dinilai pelaksanaan rencana berikutnya.
3. Evaluasi bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas atau hasil kerja dimasa mendatang.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa evaluasi merupakan penilaian terhadap kinerja organisasi yang sedang atau telah dilaksanakan. Menurut Al-Amin (2006:100) ada tiga sasaran utama dalam melakukan evaluasi, antara lain.

1. Evaluasi terhadap kegiatan.

Evaluasi terhadap kegiatan menunjukkan capaian kinerja suatu unit kerja dalam suatu kurun waktu tertentu.

2. Evaluasi terhadap program

Evaluasi terhadap program merupakan hasil komulatif dari berbagai kegiatan yang dilakukan dengan cara mengambil hasil dari setiap nilai capaian kinerja kegiatan tersebut dan kemudian memberikan pembobotan untuk dapat diperoleh nilai akhir capaian program.

3. Evaluasi terhadap kebijakan

Evaluasi terhadap kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program untuk mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Evaluasi ini sangat berguna untuk mendapatkan pengetahuan mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijadikan sebagai landasan atau pedoman kerja, apakah sesuai dengan yang diinginkan atau mungkin perlu perbaikan terhadap kebijaksanaan tersebut.

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada

konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi kebijakan publik acapkali hanya dipahami sebagai evaluasi atas implementasi kebijakan saja. Menurut Agustino (2006:188) Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi :

- a. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan / program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
- b. Tindakan yang ditempuh oleh *Implementing Agencies* sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel dan adil ini. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
- c. Efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk member informasi yang valid dapat dipercaya menjadi realisasi dari

perwujudan *right to know* bagi warga masyarakat.

B. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung. Istilah pemberdayaan sendiri muncul sekitar pertengahan 1990-an sebagai isyarat terjadinya perubahan paradigma pembangunan. Pemberdayaan merupakan upaya mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bersifat membangun masyarakat itu sendiri.

Menurut Torre (Setiawati 2007:7) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah : “ Suatu proses dimana masyarakat menjadi cukup kuat untuk dapat berpartisipasi, berbagi dalam mengontrol dan mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karenanya pemberdayaan mengharuskan masyarakat untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan tertentu serta kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan mereka.”

Masyarakat memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera dengan memiliki keterampilan serta pengetahuan yang cukup sehingga terlepas dari kesusahan dan kemiskinan agar dapat hidup lebih layak sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian Prijono (Setiawati 2007) menyatakan bahwa : “ Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar diarena

politik secara local maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif.”

Selanjutnya Simon (Hikmat 2006:11) mengemukakan bahwa: Pemberdayaan adalah suatu aktifitas refleksi, suatu proses yang mampu diinisiasikan dan dipertahankan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan atau penentuan diri sendiri (*self determination*). Sementara proses lainnya hanya dengan memberikan iklim, hubungan, sumber-sumber dan alat-alat procedural yang melaluinya masyarakat dapat meningkatkan kehidupannya. Pemberdayaan merupakan system yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik.

Berdasarkan pendapat tersebut, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemarkarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan dan kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri.

Sementara pemberdayaan menurut Sumaryadi (2005:111) menyatakan bahwa: “ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.”

Selanjutnya menurut Sumaryadi (2005:111) menyebutkan

bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga tahapan yaitu :

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat.
3. Pemberdayaan yang berarti juga melindungi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang amat penting bagi pembangunan masyarakat dan Negara, karena dengan pemberdayaan yang tepat sasaran dan terencana dengan baik akan menghasilkan masyarakat yang memiliki berkualitas sehingga mampu menciptakan suasana pembangunan yang dinamis dan berkesinambungan.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005:18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

Delivery dalam Sutrisno (2005:17) “dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan”.

Suharto (2007:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali

digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikut sertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didaya gunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Adimihardja dkk (2001, 15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Gerakan pemberdayaan masyarakat adalah sekumpulan tindakan-tindakan yang dikembangkan

oleh suatu masyarakat agar warga masyarakat dapat mengatasi masalah sosialnya atau semua bentuk investasi sosial yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan perorangan dan masyarakat secara keseluruhan. Gerakan ini diarahkan terhadap peningkatan berbagai penyediaan sarana dan proses yang langsung berhubungan dengan masalah sosial, pengembangan sumber sumber daya manusia dan perbaikan mutu kehidupan yang sarannya mencakup perorangan, keluarga dan usaha – usaha untuk memperkuat atau mengubah lembaga sosial.

Didalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menduduki masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif, konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok pemberian kekuatan kepada masyarakat.

Wahab dkk. (2002: 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu:

1. *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatar belakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.
2. *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek

pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

3. *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidak berdayaan.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu berkaitan dengan pendekatan kemandirian, partisipatif dan jaringan kerja. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai dan budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implemmentatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan added value ekonomi, tetapi juga nilai-nilai sosial budaya.

Peranan agen-agen pembaharuan dalam usaha pemberdayaan saat ini terkonsentrasi pada sasaran sumber daya manusia sebagai sasaran pokok pembinaan. Model pembangunan yang berpusat pada rakyat melalui penekanan pemberdayaan adalah yang seharusnya diterapkan. Penekanan kepada pengalaman masyarakat dalam sejarah dan posisinya dalam keberadaan budaya dan nilai-nilai sosial setempat adalah kesesuaian dengan model pemberdayaan yang akan diterapkan.

Suharto (2006:218-219), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan

pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

1. Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Sulistiyani (2004:83-84) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional (Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BPS Kepri mencatat jumlah pengangguran di Kota Tanjungpinang sebanyak 4.729 orang pada periode Januari-Agustus 2013. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 3.612 orang. Kemudian meningkat jumlah pengangguran di Tanjungpinang pada 2014 mencapai 7 ribu orang. Jumlah ini meningkat drastis dibandingkan data tahun 2013 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri yakni 4.729 orang. Saat ini jumlah angka pengangguran di Kota Tanjungpinang menurut data dari Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang mencapai 9.065 orang. Sementara, jumlah pencari

kerja (pencaker) di Kota Tanjungpinang dari tahun lalu sampai sekarang mencapai 1.900 orang. Sementara total jumlah penduduk Kota Tanjungpinang sekitar 243.686 jiwa.

Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang yang dilakukan dalam menekan angka pengangguran yaitu meningkatkan mutu para tenaga kerja, memberi pelatihan untuk membekali, meningkatkan, mengembangkan kemampuan dan produktivitas kerja. Upaya lain yang dilakukan dalam membuka peluang bagi pencaker yaitu memperluas kesempatan kerja, mendirikan industri, pabrik dan lainnya untuk mendorong usaha kecil serta menanam modal asing.

Pemerintah melalui Dinsosnaker akan mengambil langkah konkret untuk menekan jumlah pengangguran dengan menggandeng perusahaan kecil dan besar yang beroperasi di Tanjungpinang. Selain itu juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Kepri dalam segi pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya bagi pengangguran.

IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas

Dari hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa pelatihan saaja tidak cukup untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Tanjungpinang. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam mengurang jumlah pengangguran di Indonesia, namun masih saja pengangguran tidak

berkurang bahkan lebih bertambah setiap tahunnya di karenakan tidak seimbangnya jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga diharapkan mampu mengembangkan tenaga kerja secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat, dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memerhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja, dampak dari pelatihan sudah baik, ada sebagian yang bekerja dan ada yang bisa memanfaatkan untuk membuka usaha sendiri. Untuk menghindari efek-efek dari pengangguran pemerintah perlu secara terus-menerus berusaha mengatasi masalah pengangguran. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, pemerintah baru sadar setelah terjadi krisis, bahwa kebijakan pemerintah selama ini menghasilkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh, sehingga ke depan membutuhkan penanganan yang lebih serius karena tantangan semakin berat. Sejak saat itu, setiap upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat (tidak bisa tidak), karena harus terkait dengan kegiatan banyak orang

2. Efisiensi

Pada kenyataannya, banyak pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang yang pada akhirnya tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan hanya karena para peserta tidak mampu beradaptasi dengan kondisi dan suasana pelatihan yang dilaksanakan. Banyak permasalahan yang bisa saja muncul yang dapat mempengaruhi konsentrasi para peserta dalam menerima materi yang diberikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi sudah sering dilakukan walaupun adanya pelatihan belum sepenuhnya mampu membuat pesertanya mampu membuka usaha secara mandiri, karena banyak faktor salah satunya adalah masalah permodalan yang tidak disiapkan secara khusus oleh pemerintah. Nilai yang terkandung dari pengertian di atas menurut dimensi kerja dimaksudkan untuk mengembangkan kemahiran para SDM dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ideal melalui proses pembelajaran terarah, guna kebutuhan organisasi akan SDM yang berkualitas tinggi pada masa yang akan datang, dengan mendasarkan pada metode pelatihan, materi pelatihan, trainer. Melalui pelaksanaan program pelatihan yang terarah dan sistematis dapat diperoleh SDM yang memiliki kemampuan tinggi, baik dalam hal keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk memenuhi tuntutan baru dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka.

3. Kecukupan

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pelatihan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Tanjungpinang belum mampu membuat pesertanya mampu membuka usaha secara mandiri, karena banyak faktor salah satunya adalah masalah permodalan yang tidak disiapkan secara khusus oleh pemerintah. Nilai yang terkandung dari pengertian di atas menurut dimensi kerja dimaksudkan untuk mengembangkan kemahiran para SDM dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ideal melalui proses pembelajaran terarah, guna kebutuhan organisasi akan SDM yang berkualitas tinggi pada masa yang akan datang, dengan mendasarkan pada metode pelatihan, materi pelatihan, trainer. Melalui pelaksanaan program pelatihan yang terarah dan sistematis dapat diperoleh SDM yang memiliki kemampuan tinggi, baik dalam hal keterampilan, pengetahuan dan sikap untuk memenuhi tuntutan baru dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada mereka.

4. Perataan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa selama ini secara umum memang kegiatan ini belum merata. Masalah pengangguran mengakibatkan pemuda belum berperan penuh dalam pembangunan. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia, dan pemuda putus sekolah maupun yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikannya sehingga tidak terserap ke dunia kerja atau berusaha mandiri karena tidak

memiliki keterampilan kerja. Pemberdayaan pemuda dalam kemandirian ekonomi sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran (Prajasurya, 2009:1). Sehingga pemerintah harus mengupayakan agar setiap program merata keseluruh pemuda pengangguran yang ada di Kota Tanjungpinang.

5. Responsivitas

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan diatas maka dapat diketahui bahwa tidak semua masyarakat mampu berpartisipasi dalam mengurangi masalah pengangguran. Masalah pengangguran yang terjadi di Kota Tanjungpinang yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya harus segera di tangani secepatnya, karena jika dibiarkan terus menerus akan menjadi semakin menumpuk dan negara ini tidak akan maju-maju Dampak-dampak negatifnya pun cukup beragam dan semuanya merugikan bukan hanya satu atau dua orang, melainkan negara pun ikut dirugikan. Persoalan pengangguran juga bukan hanya mempengaruhi dunia kerja saja, tetapi juga mempengaruhi sumber daya manusianya juga. Oleh karena itu peran pemerintah dalam masalah pengangguran ini sangat penting, melalui strategi komunikasi, strategi jangka panjang maupun strategi jangka pendek. Pemerintah juga harus membuka lapangan pekerjaan yang luas dibidang keterampilan, dan bekerjasama dengan masyarakat.

6. Ketepatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa bantuan daerah khususnya

pendanaan memang ada. Dana alokasi umum diharapkan menjadi sebuah modal dalam rangka menciptakan pemanfaatan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika dana dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misal infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sentra-sentra lapangan kerja. Dengan demikian, Dana alokasi umum menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Di sisi lain, pemberian Dana alokasi khusus oleh pemerintah yang dialokasikan bagi daerah tertentu bertujuan untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional. Jadi, penggunaan Dana alokasi khusus telah ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak dapat membelanjakannya untuk kebutuhan lain. Daerah yang memenuhi kriteria pada setiap tahunnya akan diberikan Dana alokasi khusus. Penggunaan dana tersebut diutamakan untuk proses pembangunan yang menyangkut infrastruktur maupun sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Dengan Dana alokasi khusus diharapkan terjadi pemerataan dalam pembangunan, serta pelayanan bagi masyarakat. Daerah yang keuangannya kurang mencukupi akan terbantu oleh Dana alokasi khusus, sehingga dapat meminimalisir kecemburuan antardaerah.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa masih ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam melaksanakan program tenaga kerja oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang dalam program pelatihan keterampilan kepada pemuda pengangguran tahun 2014. Berikut hasil penelitian yang ditemukan

Pelatihan yang diadakan tidak langsung membawa dampak bagi pengurangan angka kemiskinan. Hal ini dilihat dari setiap tahun angka pengangguran di Kota Tanjungpinang masih terus meningkat. Kemudian dalam program ini juga belum dilakukan secara merata keseluruh pemuda karena keterbatasan dana, fasilitas serta informasi. Tidak semua masyarakat mampu berpartisipasi dalam mengurangi masalah pengangguran. Masalah pengangguran yang terjadi di Kota Tanjungpinang yang sudah tidak terhitung lagi jumlahnya harus segera di tangani secepatnya, karena jika dibiarkan terus menerus akan menjadi semakin menumpuk dan negara ini tidak akan maju-maju. Dampak-dampak negatifnya pun cukup beragam dan semuanya merugikan bukan hanya satu atau dua orang, melainkan negara pun ikut dirugikan. Persoalan pengangguran juga bukan hanya mempengaruhi dunia kerja saja, tetapi juga mempengaruhi sumber daya manusianya juga. Fasilitas pendukung yang disiapkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang belum memadai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya informasi dan sosialisasi khusus kepada pemuda pengangguran
2. Perlu adanya partisipasi masyarakat untuk mendukung pengurangan pengangguran di Kota Tanjungpinang seperti memberikan kesempatan membuka lapangan kerja untuk para pemuda.
3. Perlu perbaikan fasilitas oleh pihak dinas tenaga kerja agar pelatihan dapat diadakan dengan baik.
4. Perlu adanya komitmen dari seluruh masyarakat untuk membantu pemerintah memberdayakan pemuda-pemuda tempatan agar tidak menjadi pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka, 2001, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, dalam Pengantar Harry Hikmat, Cetakan Pertama, Humaniora Utama Press, Bandung
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Al-Amin, Mufham. 2006. Manajemen Pengawasan. Jakarta: Kalam Indonesia.

- Arikunto, Suharsimi dan Jabar CSA, 2010. Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara.
- Crawford, John. 2000. Ed. 2. Evaluation of Libraries and Information Services. London : Aslib, the association for information management and information management international.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2006. Belajar Dan Pembelajaran. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hikmat, Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora utama pers Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. 2004, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Satria. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta: Cidesindo.
- Setiawati dkk. 2007. Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono,2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Penerbit: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2007. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung, Refika Aditama.
- Sukirno, Sadono. 2004. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat. Jakarta : Citra Utama
- Sutrisno, Lukman. 2005. Menuju Masyarakat Partisipatif, Kanisius, Yogyakarta.
- Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Wrihantolo, Randy R & Dwijiwidjoto, Riant Nugroho. 2007.

Manajemen pemberdayaan.
Jakarta : Gramedi

